

ISSN: 1693-252X

Jurnal



Manajemen, Akuntansi dan Bisnis

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYAGAMA
MALANG

Terakreditasi SK Dirjen DIKTI
No: 26/DIKTI/Kep/2005

MABIS

VOLUME 4

NOMOR 1

APRIL 2006

**JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS
(MABIS)**

**Diterbitkan Oleh:
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG**

Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis telah terakreditasi sebagai jurnal/
majalah ilmiah berdasarkan SK Dirjen DIKTI nomor
26/DIKTI/Kep/2005 tanggal 30 Mei 2005

Ketua Penyunting
Bambang Budiantono

Wakil Ketua Penyunting
Untung Wahyudi

Penyunting Pelaksana
M. Nizarul Alim
Sumani

Penyunting Ahli
Syafi'i Idrus (Guru Besar FE-Unibraw Malang)
J.G. Nirbito (Guru Besar FE-Universitas Negeri Malang)
Widji Astuti (Guru Besar FE-Unmer Malang)
Yusuf Imam, S. (Guru Besar FE-Unisma Malang)

Mitra Bestari
Supriyanto (Universitas Negeri Malang)

Penyunting Tamu
Andi Sularso (Universitas Jember)
Tarsis Tarmudji (Universitas Negeri Semarang)
Isdairi (Universitas Tanjungpura)

Pelaksana Tata Usaha
Atiek Sutji R.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Kampus II, Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, Jl. Borobudur 35, Malang 65126 Telepon (0341) 492282. Langganan 3 Nomor setahun Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang langganan dapat dikirim pada alamat redaksi dengan wesel pos.

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas Widyagama. **Dekan:** Syamsul Bahri, **Wakil Dekan:** Muchlis Mas'ud. Terbit 3 kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember.

KATA PENGANTAR

Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis (MABIS), Volume 4, Nomor 1, April 2006, hadir kembali dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik artikel konseptual (kajian teori), maupun artikel empiris (hasil penelitian). Penulis artikel tidak hanya datang dari kalangan internal FE Universitas Widyagama Malang, tetapi juga berasal dari kalangan eksternal, baik itu PTN maupun PTS. Hal ini sesuai dengan misi utama jurnal ini, yaitu sebagai media informasi dan komunikasi yang bersifat ilmiah.

Tim penyunting mengundang para akademisi (dosen, praktisi maupun birokrasi di bidang Manajemen, Akuntansi dan Bisnis untuk menyebarluaskan gagasan atau kajian teori maupun hasil temuan dalam penelitian untuk dimuat dalam jurnal ini. Pada akhirnya gagasan atau temuan tersebut akan lebih bermanfaat bagi kepentingan banyak orang dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Semoga artikel-artikel dalam terbitan kali ini bermanfaat bagi kita semua.

Malang, April 2006

Ketua

*Jurnal Manajemen, Akuntansi
dan Bisnis (MABIS)*

FE Universitas Widyagama Malang

Belanja Pemerintah dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Maluku

Sanusi Fattah¹

***Abstract:** This research uses descriptive and verificative methods with explanatory research. Our methodology improves on previous research on this topic by explicitly recognizing the role of government expenditure and economic growth to the income distribution. The aims of this study are to analyze the effects of government expenditure and economic growth on the income distribution for regression model. This study use secondary data in the form of time series data of Maluku Province. The result of this study shows that government expenditure have positive and significance effects on the income distribution, but economic growth have negative and significance effect to the income distribution in the province of Maluku.*

Key word: Government expenditure, income distribution; and economic growth.

1. Latar Belakang

Perubahan mendasar yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah cara pandang dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan sumber daya pemerintahan terutama sumber daya keuangan.

Pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah adalah faktor kunci keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dua peran utamanya, yaitu: (1) memberikan pelayanan kebutuhan dasar; dan (2) kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. Oleh karenanya UU No 32 Tahun 2004 memberikan kepada daerah kewenangan yang seluas-luasnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan peran APBD sebagai salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi daerah harus diarahkan agar memberikan *outcomes* (dampak) yang benar-benar mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan sosial ekonomi

yang dihadapi masyarakat. Apalagi APBD sebagian besar pemerintah daerah itu hanya sebagian kecil saja bertumpu pada pendapatan asli daerah. Peran pusat dalam mengalokasikan dana untuk mencukupi kebutuhan anggaran masih sangatlah besar.

Kecenderungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah *Overhead Cost* pemerintah daerah yang tinggi. Ini telah menyerap sebagian resources yang sangat terbatas untuk pembiayaan eksekutif dan legislatif daerah. Akibatnya tinggal sedikit resources yang tersisa untuk kegiatan pelayanan. Ini dapat dilihat pada belanja publik yang tidak terlampau besar dibandingkan dengan belanja aparatur.

Belanja publik tersebut ternyata tidak diarahkan untuk membangkitkan ekonomi daerah tetapi cenderung untuk membuat proyek monumental yang dianggapnya dapat meningkatkan gengsi daerah. Bidang-bidang yang nyata-nyata berperan dalam meningkatkan kemampuan rakyat untuk berusaha dan memecahkan persoalan sosial ekonomi yang dihadapi rakyat kurang

mendapat perhatian yang memadai seperti pertanian, peternakan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Rencana-rencana alokasi dana dalam APBD adalah cerminan kebijakan daerah sering disusun secara kurang transparan dan kurang aspiratif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mampu menghasilkan *output* (produk dan kebijakan), hasil (*intermediate outcomes*) dan dampak (*final outcomes*) yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi serta kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Manajemen *resources* berupa penggunaan input dan pengelolaannya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* masih belum mengedepankan inovasi dan kreatifitas dan tidak fokus.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun oleh pemda harus didasarkan pada SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki perencanaan strategik (Renstra). Renstra disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD.

2. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap distribusi pendapatan Tahun 2006.

3. Tinjauan Pustaka

A. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Maka dengan demikian pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya, yang sebagian besar dari pajak.

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (arti luas sekaligus mencerminkan penawaran agregat). Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (Government Expenditure). Dengan membandingkan G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam membentuk permintaan agregat atau pendapatan nasional (Guritno M 1993 : 37).

Dalam pelaksanaannya, pengeluaran pemerintah daerah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kebijaksanaan yang dilaksanakan sejak Repelita I sampai saat sekarang masih berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis.

Berimbang berarti jumlah keseluruhan pengeluaran baik rutin dan pembangunan, selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula, maka pemerintah akan mengurangi pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan. Demikian pula dalam hal penerimaan, apabila melampaui rencana semula, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya.

Selanjutnya pengeluaran pemerintah dikategorikan dalam pengeluaran rutin dan

pembangunan, sebagaimana yang dikatakan oleh *Kunarjo* (2002 : 41) yaitu :

1. Pengeluaran rutin, adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan hutang serta pengeluaran rutin lainnya.
2. Pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengeluaran pembangunan di bagi dalam pengeluaran habis pakai dan pengeluaran transfer.
 - a. Pengeluaran habis, yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang sifatnya secara langsung tidak menghasilkan return kepada pemerintah namun secara tidak langsung mempunyai dampak luas kepada pertumbuhan kemajuan perekonomian negara serta pemerataan pendapatan dan masyarakat. Dan dana ini dikelola oleh departemen menurut bidangnya masing-masing.
 - b. Pengeluaran transfer, yaitu pengeluaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dipergunakan untuk pengeluaran meliputi :
 - 1) Bantuan pembangunan daerah, yaitu membantu pemerintah daerah dalam menambah APBD untuk pembangunan daerah dalam bentuk bantuan pembangunan Inpres.
 - 2) Penyertaan modal pemerintah, yaitu pengeluaran negara (APBN)
 - 3) yang dipergunakan untuk menambah modal

perusahaan, terutama perusahaan negara yang memerlukan.

- 4) Subsidi, yaitu bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen serta pengendalian harga umum, dan subsidi dapat diberikan melalui BUMD/BUMN maupun Perbankan.

Pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan sarana-sarana fisik dan infrastruktur lainnya, merupakan investasi yang dilakukan pemerintah yang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat pada sektor-sektor produksi. Anggaran pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan menurut fungsinya dengan klasifikasi sektor, sub sektor, dan program. Didalam sektor-sektor pembangunan tersebut, alokasi anggaran kemudian dijabarkan dalam berbagai sub sektor dan program yang ditujukan untuk mendorong perekonomian daerah yang sarannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi produksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu pengeluaran pembangunan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : Jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun disadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, perhatian ahli-ahli ekonomi klasik tertuju pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai suatu perluasan dari teori Keynes, teori Horrow-Domar melihat masalah pertumbuhan ekonomi itu dari segi

permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku bila pengeluaran agregat melalui kenaikan investasi secara terus menerus pada tingkat pertumbuhan yang ditentukan (*Warranted Rate of Growth*). Sedangkan teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandangan berbeda, yaitu dari segi penawaran, menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana

ΔY = Tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = Tingkat pertambahan barang dan modal

ΔL = Tingkat pertambahan tenaga kerja

ΔT = Tingkat pertambahan teknologi

Analisis *Solow* selanjutnya membentuk formula matematik sebagai berikut :

$$g = m \cdot \Delta K + b \cdot \Delta L + \Delta T$$

Dimana :

g = Persentase pertumbuhan ekonomi

m = Produktifitas modal marginal

b = Produktifitas marginal tenaga kerja

ΔT = Tingkat pertambahan teknologi

Persamaan diatas pada hakekatnya menyatakan; tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan modal dan produktifitas modal marginal, pertambahan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja marginal dan perkembangan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah salah satu indikator makro yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan di suatu daerah.

Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah digunakan PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi riil merupakan pertumbuhan setelah dikurangi dengan pengaruh perubahan harga atau inflasi atas barang dan jasa yang diproduksi. Secara internal data pertumbuhan ekonomi berguna untuk melihat seberapa jauh keberhasilan

pembangunan ekonomi suatu daerah. Bahkan dapat melihat kontribusi terhadap struktur perekonomian di suatu daerah, sedangkan secara eksternal pertumbuhan ekonomi berguna untuk membandingkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dengan daerah lain.

Sedangkan Nopirin (1996: 9), mengemukakan bahwa pada umumnya tujuan kebijakan ekonomi yang dicapai adalah keseimbangan intern dan ekstern (*internal and external balance*). Keseimbangan intern diarahkan untuk mencapai laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi, keseimbangan kerja yang meningkat dan laju inflasi yang rendah. Pertumbuhan merupakan persentasi perubahan produksi domestik bruto yang diukur menurut harga tetap pada tahun tertentu. Besaran ini dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu kriteria untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah.

Berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah (APBD) khususnya anggaran belanja pembangunan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah, dapat dilihat dari hubungan perimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Yang mana pada anggaran dikenal beberapa prinsip yaitu :

a. Anggaran Berimbang dan Dinamis

Berimbang maksudnya sejumlah pengeluaran (rutin dan pembangunan) selalu sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan. Dinamis berarti dalam hal penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan semula, maka pemerintah akan mengurangi pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan. Demikian juga dengan penerimaan, apabila melampaui rencana semula, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya.

Penerapan prinsip ini pada perekonomian berpengaruh terhadap stabilitas (menghindari inflasi), yang diasumsikan banyak tergantung dari tingkat ekspansi

dari pengeluaran maupun tingkat kontraksi dari penerimaan.

b. Anggaran Defisit

Yaitu apabila pengeluaran pemerintah melampaui pendapatan yang diperoleh. Maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian bersifat ekspansif.

c. Anggaran Surplus

Yaitu apabila jumlah penerimaan pemerintah lebih besar dari jumlah pengeluaran. Maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap perekonomian bersifat kontraktif terhadap tenaga kerja, produksi daerah dan output.

Arsyad (1992 : 43), mengemukakan bahwa bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, prinsip anggaran defisit diterapkan karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tjokromidjoyo (1974 : 197), menyatakan bahwa pengeluaran negara (Anggaran Belanja dan Pembangunan) selalu didasarkan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang tumbuh karena perkembangan kondisi negara dan masyarakat juga dimaksudkan untuk usaha-usaha pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Menurut Kunarjo (1996 : 44), untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi yang memadai. Sedangkan untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan diperlukan mekanisme pembangunan yang lebih sistematis yaitu gerakan kedepan dari satu sistem berdimensi pada produksi, peningkatan taraf hidup, sikap, kelembagaan serta kebijaksanaan.

C. Faktor-faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan yang dapat diperoleh serta jumlah dan jenis barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat

mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Peranan penanaman pertanian untuk ekspor dan industri pertambangan minyak menjadi penggerak awal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah suatu bukti nyata mengenai besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat awal pertumbuhan ekonomi.

b. Jumlah dan Kualitas Penduduk dan Tenaga Kerja

Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong dan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan pertambahan tersebut memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Disamping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, tingkat kualitas penduduk akan bertambah tinggi, maka produktivitas akan bertambah yang selanjutnya akan meningkatkan hasil produksi yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja.

Dorongan lain yang timbul dari pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi yakni peningkatan luas pasar. Luas pasar, jumlah produksi dan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara tergantung pada pertumbuhan dan kualitas penduduk.

c. Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang modal dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang modal harus dibarengi dengan peningkatan teknologi sehingga akan tercipta kemajuan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Kemajuan ekonomi pada berbagai negara akan mengakibatkan peningkatan teknologi, teknologi akan menimbulkan beberapa efek positif terhadap pertumbuhan

ekonomi. *Pertama*, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi suatu barang, dimana jumlah produksi dapat meningkat dengan biaya produksi relatif menurun. *Kedua*, kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas produksi dan penelitian terhadap kekayaan alam untuk diproduksi.

d. Sistem Sosial dan Pola Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan pola sikap masyarakat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pola sikap masyarakat dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Pola sikap yang dimaksud antara lain adalah pola sikap hemat yang bertujuan untuk menciptakan peluang investasi, pola sikap gemar bekerja keras sehingga dapat mengembangkan dan menciptakan peluang usaha, dan pola sikap yang selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan profit.

Terkadang sistem sosial dan pola sikap masyarakat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah kebijakan yang tepat yang diawali pada tingkat pemerintahan sehingga tercipta balance antara pola sikap masyarakat dan pemerintah.

D. Distribusi Pendapatan

Kesenjangan antar daerah menyangkut pola dan arah investasi serta prioritas alokasinya di antara berbagai daerah dalam wilayah negara kesatuan, khususnya di bidang sumber daya manusia dan dalam prasarana fisik. Pola dan arah investasi pada bidang-bidang tersebut di berbagai daerah akhirnya berpengaruh pada tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah.

Model pertumbuhan Neo-Klasik beranggapan bahwa pertumbuhan antar daerah akan mengarah pada pola *convergence* (mengarah pada satu titik keseimbangan) walaupun tanpa campur

tangan pemerintah. Sementara model pertumbuhan Harrod-Domar mengisyaratkan pertumbuhan antar daerah mengarah pada pola *divergence*, oleh karenanya diperlukan campur tangan pemerintah. Perlunya campur tangan pemerintah ini karena dalam kenyataannya, modal tidak mengalir dari daerah yang maju ke daerah yang kurang maju seperti yang diisyaratkan dalam teori Harrod-Domar, melainkan terjadi sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Myrdal, Hirschman dan Friedman juga sependapat dengan Harrod-Domar, bahwa pertumbuhan antar daerah tidak mengarah pada satu titik temu.

Williamson (1965) melakukan analisis tentang kesenjangan distribusi pendapatan di berbagai negara dengan mengambil sampel sebanyak 24 negara dalam kurun waktu 10 tahun (1950-1960). Formula yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar negara tersebut adalah sebagai berikut:

$$V_{W_{it}} = \frac{\sqrt{\left[\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \right] \times \frac{f_i}{N}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

$V_{W_{it}}$ = koefisien variasi Williamson yang menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah, daerah i tahun ke-t.

Y_i = PDRB per kapita daerah i

\bar{Y} = PDB per kapita nasional

f_i = jumlah penduduk di daerah i

N = jumlah penduduk nasional

Dengan rumus tersebut, Williamson menemukan bahwa tingkat kesenjangan distribusi pendapatan tertinggi terjadi pada negara Brazil dengan nilai V_w sebesar 0,7; sedangkan tingkat kesenjangan distribusi

pendapatan yang terendah terjadi pada negara Australia dengan nilai Vw sebesar 0,058.

Dengan menggunakan formula Williamson, beberapa peneliti telah mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia antara lain:

1. Hendra Esmara (1976) menggunakan data PDRB periode 1968-1972 menemukan bahwa pada tahun 1968 koefisien variasi Williamson sebesar 0,340 dan kemudian meningkat menjadi 0,522 pada tahun 1972.
2. Uppal & Budiono (1986) menggunakan data PDRB 26 propinsi dalam kurun waktu 1976-1980, menyimpulkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan distribusi antar daerah di Indonesia cenderung menurun dalam kurun waktu 1976-1978 (dengan koefisien Williamson 0,4631 menjadi 0,4344), tetapi koefisien itu meningkat lagi menjadi 0,5240 tahun 1979 dan menurun kembali menjadi 0,4435 pada tahun 1980.
3. Soeroso et. al. (1989) menggunakan data PDRB 26 propinsi di Indonesia periode 1975-1983, menemukan bahwa tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dalam kurun waktu tersebut berfluktuasi dengan arah yang tidak jelas, namun koefisien Williamson-nya terpusat di sekitar 0,46. Jika digunakan kriteria Oshima, maka tingkat kesenjangan distribusi pendapatan tersebut berada pada tingkat kesenjangan sedang.

4. Alat Analisis

Untuk mencapai beberapa tujuan dari kajian ini, digunakan formulasi sebagai berikut:

- *Regresi berganda:*

$$Vw = \beta_1 + \beta_2 Y_t + \beta_3 G_t + \mu_t$$

Di mana :

Vw= Tingkat distribusi pendapatan antar kabupaten/kota yang diukur dengan Indeks Williamson.

Y = Pertumbuhan ekonomi.

G = Pengeluaran Pemerintah

β_1 = Konstanta

β_1 dan β_1 = Parameter yang ukur

μ = Kesalahan pengganggu

t = Trend waktu

- *Pertumbuhan ekonomi*

$$r = \frac{PDRB_t . PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

$PDRB_t$ = PDRB tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

- *Indeks Williamson* dengan persamaan sebagai berikut :

$$Vw = \frac{\sqrt{\left[\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \right] \times \frac{f_i}{N}}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

Vw = Koefisien Variasi Williamson yang menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan di Propinsi Maluku

Y_i = PDRB per kapita daerah i

\bar{Y} = PDB per kapita nasional

f_i = jumlah penduduk di daerah i

N = jumlah penduduk nasional

Angka Indeks Williamson berada antara 0 – 1, dimana jika Koefisien Vw sama dengan 0 (merata mutlak) dan Vw sama dengan 1 (tidak merata mutlak).

4. Hasil Perhitungan dan Analisis

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu: Tingkat konsumsi masyarakat, investasi swasta, Belanja pemerintah, ekspor dan impor. Belanja pemerintah untuk pembangunan sangat menentukan tinggi rendahnya konsumsi dan investasi, sebagaimana diketahui Belanja pembangunan mempunyai 2 (dua) sifat dan fungsi yaitu: (1) Belanja yang sifatnya komplementer terhadap investasi pembangunan sarana transportasi, pendidikan, pembangkit tenaga listrik, sarana komunikasi dan lain-lain, (2) Belanja yang sifatnya substitusi terhadap konsumsi, misalnya pemberian makanan tambahan bagi siswa-siswi sekolah, perbaikan gizi masyarakat, dan lain-lain.

Untuk merangsang investasi maka perlu dukungan infrastruktur yang memadai, ketersediaan jalan, keamanan, listrik, komunikasi dan pasar merupakan hal yang sangat dibutuhkan, Belanja pemerintah diharapkan akan memberikan kontribusi akan tersedianya infrastruktur tersebut, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Belanja pemerintah akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap Distribusi Pendapatan.

Untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Propinsi Maluku akan digunakan model regresi linear berganda (*multiple regression model*) dengan menggunakan bantuan paket program Eviews.

Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi pendapatan di Propinsi Maluku, hal tersebut dibuktikan dengan hasil regresi yang menunjukkan bahwa semua variabel independen signifikan pada derajat keyakinan (*level of significance*) $\alpha = 10\%$, serta lolos

dari uji asumsi klasik (otokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Hasil selengkapnya dapat diikuti pada penjelasan Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Hasil Regresi Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Distribusi Pendapatan Antar Daerah di Propinsi Maluku

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.494596	0.016652	29.70262	0.0001
PE	-0.006944	0.002946	-2.357146	0.0997
PP	6.29E-09	1.36E-09	4.624426	0.0190
R-squared	0.920994	Meandependent var		0.586075
Adjusted R-squared	0.868324	S.D. dependent var		0.017047
S.E. of regression	0.006186	Akaike info criterion		-7.026225
Sum squared resid	0.000115	Schwarz criterion		-7.130346
Log likelihood	24.07868	F-statistic		17.48597
Durbin-Watson stat	3.121105	Prob(F-statistic)		0.022207

Sumber : Hasil Analisis Data dengan Program Eviews.

Melihat hasil perhitungan pada Tabel 4.1 di atas, apabila dibuktikan hipotesisnya dengan menggunakan uji t, maka terlihat bahwa hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel independen signifikan pada derajat keyakinan (*level of significance*) $\alpha = 10\%$ dengan degrees of freedom ($n-k-1 = 7-2-1 = 4$ adalah 2,132), dan terlihat bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh yang searah terhadap distribusi pendapatan antar wilayah. Artinya bahwa jika terjadi peningkatan pengeluaran

pemerintah, akan menyebabkan peningkatan distribusi pendapatan.

Berbeda dengan variabel pengeluaran pemerintah di atas, untuk variabel pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pengaruh yang berkebalikan, yaitu bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan maka akan menyebabkan penurunan tingkat distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyebab naiknya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Propinsi Maluku.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi misalnya Kuznets, dengan mengamati data lintas waktu di negara maju, yang menemukan bahwa pembagian pendapatan di negara tersebut setelah 1930 terus membaik, dan menyimpulkan sebagian hipotesa bahwa pada awal pembangunan ekonomi akan ditandai oleh semakin buruknya pembagian pendapatan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Jadi pertumbuhan dan pemerataan pada awalnya merupakan dua hal yang bertentangan tetapi setelah mencapai titik kritis, keduanya saling melengkapi.

Hasil ini sejalan dengan pernyataan Mangkusubroto (1993) bahwa Belanja pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Belanja pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan negara harus ditingkatkan. Maka dengan demikian pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber penerimaannya, yang sebagian besar dari pajak.

Belanja pemerintah daerah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan Belanja menyatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (arti luas sekaligus mencerminkan penawaran agregat).

Variabel G melambangkan Belanja pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi Belanja pemerintah dalam membentuk permintaan agregat atau pendapatan nasional.

Belanja pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan sarana-sarana fisik dan infrastruktur lainnya, merupakan investasi yang dilakukan pemerintah yang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat pada sektor-sektor produksi. Anggaran pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan menurut fungsinya dengan klasifikasi sektor, sub sektor, dan program. Didalam sektor-sektor pembangunan tersebut, alokasi anggaran kemudian dijabarkan dalam berbagai sub sektor dan program yang ditujukan untuk mendorong perekonomian daerah yang sasarannya meningkatkan Distribusi Pendapatan.

Dengan demikian Belanja pemerintah yang mempengaruhi produksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat yaitu Belanja pembangunan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, Bose, Haque, and Osborn (2003) dalam penelitiannya mengenai *Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries*, penelitian tersebut mengidentifikasi peranan dari batasan anggaran pemerintah dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi sebagai akibat dari variabel yang dihilangkan dari 30 negara berkembang pada periode tahun 1970-an sampai tahun 1980-an.

Dua hal utama yang ditemukan dari penelitian tersebut adalah (1) sebagian Belanja modal pemerintah terhadap GDP adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan akan tetapi tidak signifikan terhadap alokasi Belanja, (2) pada level sektoral, investasi dan total Belanja

pemerintah pada sektor pendidikan adalah satu-satunya hal yang signifikan dalam hubungannya dengan pertumbuhan dimana anggaran yang terbatas sehingga memaksa untuk menghilangkan beberapa variabel.

Dalam sebuah artikel ekonomi mengenai *The Importance Of Public Expenditure Reform for Economic Growth and Stability (2006)* menunjukkan bahwa rasio belanja publik terhadap keuangan pemerintah negara-negara Eropa mengalami peningkatan sejak tahun 1960-an, walaupun pada tahun-tahun terakhir mengalami penurunan. Perbandingan Belanja pemerintah terhadap GDP signifikan pada tahun 1960 sebesar 30,4% dari GDP sampai 45,0% dari GDP pada tahun 1980 dan secara berangsur-angsur bangkit sampai mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 49,0% dari GDP. Dan data terakhir pada tahun 2004 turun menjadi 47,7% dari GDP.

Setiawan dan Handoko (2006), dalam penelitiannya mengenai distribusi pendapatan 2006: Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas. Hasil perhitungan estimasi Distribusi Pendapatan dengan *Time Series Analysis* untuk tahun 2006 sebesar 6,6%. Estimasi Distribusi Pendapatan ini didasarkan atas perhitungan pendapatan nasional menggunakan metode penggunaan (*Expenditures*). Dalam metode penggunaan, perhitungan pendapatan nasional dihitung dari penjumlahan input-input: *Consumption (C)*, *Government Spending (G)*, *Investment (I)*, *(X) Export*, dan *(I) Import*. Untuk menyeimbangkan selisih, maka BPS (Biro Pusat Statistik) menambahkan komponen perubahan dalam stok. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa metode ini dapat membuat estimasi yang cukup baik dalam Distribusi Pendapatan, karena dalam proyeksi PDB-nya memiliki tingkat kesalahan hanya sebesar 3,72%.

Syawaluddin (2002) dalam penelitiannya mengenai Belanja Pembangunan dalam Mendorong Distribusi

Pendapatan kota Makassar. Dalam menganalisis *multiplier effect* dengan Belanja pada kesembilan sektor tersebut yang diteliti, diketahui bahwa seharusnya Belanja pada sektor pendidikan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada Distribusi Pendapatan Kota Makassar dengan laju pertumbuhan sebesar 22,3 persen, Belanja sektor lingkungan 5,13 persen, IPTEK 12,2 persen dari Agama sebesar 19,6 persen.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian hipotesis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan antar daerah di Propinsi Maluku. Artinya bahwa jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, akan menyebabkan peningkatan distribusi pendapatan.
2. Berbeda dengan variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang berkebalikan, yaitu bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan maka akan menyebabkan penurunan tingkat distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyebab naiknya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah di Propinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah dan PAU Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2000, "Pengembangan Model Standar Analisa Belanja Anggaran Daerah", Yogyakarta.
- Depdagri, 1997, Kepmendagri No.690.900.327.1996, "Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan".

- Devas, Nick, Dkk, 1989. *“Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”*. UI – Press, Jakarta
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Handoko, Rudi dan Setiawan, Sigit 2006. *Pertumbuhan Ekonomi 2006 : Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 9, No 4.
- Narso, 2002, “Evaluasi Proses dan Alokasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000”, *Tesis S-2*, Program Pascasarjana, UGM, (tidak dipublikasikan).
- Maluku, Biro Pusat Statistik (BPS), Beberapa Edisi.
- Mawardi, Gusti, 2002, “Anggaran Belanja Darah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Proses dan Pengalokasian”, *Tesis S-2*, Program Pascasarjana, UGM, (tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo, 2000, “Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001” Seminar *Isu Terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001*. Makalah Seminar, HIMMEP UGM, Yogyakarta.
- Niloy Bose, M. Emranul Haque, and Denise R Osborn 2003. *“Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries”*. Journal Of Economics.
- Republik Indonesia., 2000, “Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”*.
2005,
“Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo*”, Kabupaten Wajo.
2000, “Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ perihal *Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001*.”
2004, “Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*”, Citra Umbara, Bandung.
2004, “Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”, Citra Umbara, Bandung.
2005, “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah”*.
2006, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*”.
- Safrizal, 1997. *“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”*. Prisma.
- Suparmoko, M, 1996. *“Keuangan Negara”*. Ed. 3, BPFE, Yogyakarta.
- Syawaluddin 2002. *“Pengeluaran Pembangunan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar”*. Tesis Untuk Memperoleh Gelar Magister Universitas Hasanuddin, Makassar.

Widodo, Triyanto. Hg.Suseno., 1990,
Indikator Ekonomi, Kanisius,
Yogyakarta.

Williamson, Jeffrey, G, 1965. "*Regional
Inequality and The Process of
National Development : a*

Description of the Patterns".
Economic Development and Cultural
Change, Vol. XIII, No. 4.